

## Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia

**Pepen Supendi**

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Haris Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, 40614  
e-mail: pepen.supendi@gmailcom

**Abstrak:** Ada beberapa jalur untuk mengenal budaya dari suku, bangsa atau negara. Pertama, melalui sarana perniagaan atau kehidupan ekonomi. Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja sama bilateral yang bersifat mutual-cooperation, baik dalam bentuk pertukaran para ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Kontak antar negara dalam bentuk kerja sama pengembangan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk memperluas cakrawala terhadap pendidikan nasional dan diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari negara tertentu untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan hal itu, dalam tulisan ini memaparkan variasi (format) sistem pendidikan di Indonesia, sebagai bahan kajian kita demi tercapainya salah satu cita-cita bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

**Kata Kunci:** *Sistem, Pendidikan, Indonesia.*

### **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia, sebenarnya telah memiliki nilai-nilai filosofis dan edukatif yang mendasari perilaku kehidupannya; namun demikian formulasi dari nilai-nilai filosofis tersebut yang dijadikan sebagai filsafat pendidikan nasional hingga sekarang masih terus dicari untuk ditemukan. Meskipun sangat sukar merumuskan filsafat pendidikan nasional Indonesia yang tepat, namun dasarnya dapat kita temukan dari tiga aspek dasar, yaitu: konsep manusia, nilai dasar manusia Indonesia, dan visi pendidikan Indonesia ke depan.

*Pertama*, konsep manusia. Pertanyaan “siapakah manusia itu?”, telah menjadi tema sentral sepanjang zaman, dan tidak pernah bisa dijawab secara final. Para teolog, filosof, psikolog, dan saintis lainnya terus mencari jawab atas pertanyaan tersebut, tetapi semakin banyak pertanyaan diajukan tentang siapa

manusia itu?, maka semakin kelihatan betapa luasnya penge-tahuan yang masih terpendam tentang diri manusia itu sendiri. Manusia sebagai sebuah misteri.

Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf besar Yunani Kuno, mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya (*the animal that reasons*). Sementara DC Mulder (seorang sarjana Protestan), manusia adalah makhluk yang berakal, akallah yang merupakan perbedaan pokok di antara manusia dan binatang; akallah yang menjadi dasar dari segala kebudayaan. Sementara menurut Marxisme (ajaran Karl Mark) manusia adalah makhluk yang memakai alat-alat, makhluk yang bekerja, makhluk yang memproduksi.

Berbeda dengan konsepsi para filosof dan ilmuwan di atas, dalam konsep Islam, manusia terdiri dari tiga unsur, tubuh, hayat, dan jiwa<sup>1</sup>. Tubuh bersifat materi, tidak kekal dan dapat hancur. Hayat berarti hidup, dan jika tubuh mati, maka kehidupan pun berakhir. Sedangkan jiwa bersifat kekal. Menurut filosof Islam, pada binatang dan tumbuh-tumbuhan ada juga jiwa. Tetapi eksistensi jiwa di sini terikat dengan tubuh yang bersifat materi. Oleh karena itu, jika makhluk itu mati, jiwa pun ikut hancur.

Lebih terinci lagi, al-Quran menyebut manusia dengan menggunakan tiga kategori: *pertama*, manusia sebagai makhluk biologis (*al-Basyar*) pada hakekatnya terdiri dari struktur organ-organ fisik (QS. al-Hijr: 28; al-Tin: 4). *Kedua*, manusia sebagai makhluk psikis (*al-Insan*) mempunyai potensi rohani seperti fitrah (QS. al-Rum: 30), *qalb* (QS. al-Hajj: 46), dan akal (QS. Ali Imran: 190-191). Potensi tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk tertinggi derajatnya yang berbeda dengan makhluk lainnya (QS. al-Isra: 70). Tetapi bila potensi rohani dan akal tersebut tidak digunakan, maka manusia tidak ubahnya seperti binatang bahkan lebih hina (QS. al-A'raf: 179; QS. al-Furqaan: 44), sedangkan bentuk insaniyahnya (*humanism*) terletak pada iman dan amalnya (QS. al-Tin: 6). *Ketiga*, manusia sebagai makhluk sosial (*al-Naas*) mempunyai tugas sosial dan tanggung jawab sosial terhadap alam semesta. Klasifikasi ketiga ini karena manusia

---

<sup>1</sup>A Maksum dan LY Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern: Mencari Visi Baru Alas Realitas Baru Pendidikan Kita*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2004), h. 230

berfungsi tidak hanya sebagai *'abdullah* (hamba Allah) (QS. al-Dzariyat: 56), tetapi juga sebagai *khalifatullah* (wakil Allah di muka bumi) (QS. al-Baqarah: 30; QS. Yunus: 14), dengan mandat untuk mewujudkan ke-makmuran (QS. Hud: 61) dan kebahagiaan (QS. al-Ahzab: 71; QS. al-Ra'd: 29) dalam kehidupan di dunia dan akhirat (QS. al-Qashash: 77). Manusia dengan fungsinya sebagai makhluk sosial tersebut harus bisa mengembangkan nilai-nilai insani yang Islami dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut meliputi persaudaraan (*ukhuwah insaniyah*), kerja sama (*ta'awun*) saling kenal mengenal (*ta'aruf*), per-damaian (*islah*), kasih sayang (*rahmat*), kebaikan (*ihsan*), toleransi (*qasamuh*), dan pemaaf (*afwun*).

*Kedua*, nilai dasar manusia Indonesia. Bangsa Indonesia yang sering dikategorikan bangsa Timur mewarisi nilai-nilai ketimuran, seperti sopan-santun, jujur, ramah, berani, cakap, dan tegas. Pada dasarnya manusia Indonesia adalah manusia yang jujur dan tidak sombong; bahkan kejujurannya dalam banyak hal digunakan oleh orang atau bangsa lain untuk memperlemah posisi manusia Indonesia sendiri. Manusia Indonesia juga memiliki sifat sopan dan santun terhadap orang lain, ramah kepada sesama, berani membela kebenaran, cakap menghadapi kehidupan, dan tegas menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan.

*Ketiga*, visi pendidikan Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan bahwa hakikat visi pendidikan nasional adalah “untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya”. Manusia seutuhnya menyangkut keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, spiritual, keterampilan, produktivitas, dan daya saingnya. Untuk itu semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Pemerataan dan perluasan kesempatan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan

sehingga diharapkan bahwa keadilan di dalam pelayanan pendidikan akan meningkat.

Lebih terperinci, fungsi dan tujuan pendidikan Nasional (Indonesia) dijelaskan dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003, yang tercantum dalam bab II, pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional dijelaskan: Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat di tengah masyarakat dunia. Sementara pada pasal 4, yang menjelaskan tentang tujuan, dijelaskan: Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika kita berpedoman pada landasan yuridis pendidikan nasional sebagaimana diuraikan di atas, tujuan pendidikan nasional berkaitan dengan kehidupan individu, kehidupan sosial, dan kehidupan profesional. Kehidupan individu bisa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan individu-individu, seperti agama, hak, tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, pertumbuhan yang diinginkan oleh pribadi mereka, dan persiapan untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan sosial bisa meliputi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan profesional bisa meliputi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, kemandirian, kreativitas, kewirausahaan, dan kecakapan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia dari generasi ke generasi sepanjang zaman, atau dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, agama dan kebudayaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pendidikan berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,h. 233

<sup>3</sup>H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1 dan Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), h. 123

kehidupan manusia tersebut, sebagaimana pernyataan W Robert Houston<sup>4</sup> bahwa *“The development of education throughout history parallels the development of civilizations”*.

Perubahan kehidupan manusia bagaimanapun bersifat dinamis, dan semakin lama berlangsung semakin cepat dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan pemikiran ini Terence J Lovat dan David L Smith<sup>5</sup> mengemukakan *“Currently, as human being, we are facing changes that are happening more quickly, and are more fundamental, than ever before”*. Selain berlangsung lebih cepat dan lebih fundamental, perubahan tersebut juga menembus ke seluruh bidang kehidupan manusia.<sup>6</sup> Berkenaan dengan itu, bidang pendidikan juga mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang lain dari kehidupan masyarakat.

Dengan lingkungan kehidupan yang berubah dan berkembang sangat cepat, pendidikan dihadapkan kepada tantangan yang serius, seperti dalam ungkapan Houston<sup>7</sup> bahwa *“Education is challenging and education is challenged”*. Pendidikan merupakan tantangan, karena untuk mendidik dengan baik agar peserta didik mampu belajar untuk belajar (*learning how to learn*) dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang merupakan tantangan bagi para pendidik. Sementara itu pendidikan ditantang untuk dapat mempersiapkan peserta didik dengan berbagai nilai-nilai, sikap, kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi peranannya di masa depan.

Dengan tugas yang berorientasi pada masa depan tersebut maka menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi para pendidik untuk memahami masa depan agar dapat mempersiapkan peserta didik dengan bekal kemampuan yang berguna untuk menjalani kehidupan masa mendatang. Apabila para pendidik tidak mampu memahami masa depan maka besar kemungkinan pengalaman belajar atau

---

<sup>4</sup>W Robert Houston, (*et.al.*), *Touch the Future: Teach!*, (St Paul: West Publishing Company, 1988), h. 22

<sup>5</sup>Terence J Lovat dan David L. Smith *Curriculum: Action on Reflection*, (Wentworth Falls NSW: Social Science Press. 1993), h. 200

<sup>6</sup>Winzer Marzurek dan Majorek, *Education in a Global Society: a Comparative Perspective*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), h. 8-9

<sup>7</sup>W Robert Houston, *Touch*, h. 5

kurikulum yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan lebih lanjut justeru akan menambah masalah sosial.<sup>8</sup> Dalam kerangka untuk memahami masa depan itulah maka sungguh penting dan sangat menarik untuk mengkaji mengenai variasi (format) sistem pendidikan di Indonesia ini.

### **Pengertian Sistem Pendidikan**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *sistema* yang artinya: suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian (*whole compounded of several parts*).<sup>9</sup> Di antara bagian-bagian itu terdapat hubungan yang berlang-sung secara teratur. Definisi sistem yang lain dikemukakan Hasbullah sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Di dalam sistem itu ada tujuan, proses, dan berbagai unsur atau komponen untuk mewujudkannya.

Dikemukakan oleh Ryans, sistem adalah sejumlah elemen (objek, orang, aktivitas, rekaman, informasi dan lain-lain) yang saling berkaitan dengan proses dan struktur secara teratur, dan merupakan satu kesatuan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang dapat diamati (dapat dikenal wujudnya) sehingga tujuan tercapai.<sup>11</sup> Sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Rumusan yang lain dikemukakan oleh Elis M Award yang dikutip oleh Anas Sudjana, ia menambahkan unsur rencana ke dalamnya, sehingga sistem itu dikatakannya merupakan sehimpunan komponen atau sub sistem yang

---

<sup>8</sup>Ornstein dan Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, (Boston: Allyn and Bacon, 1998), h. 389

<sup>9</sup>Tatang Amirin, *Pengantar Sistem*, (Jakarta : Rajawali Press, 1886), h. 11.

<sup>10</sup>Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 123.

<sup>11</sup>Ryans, *System Analysis in Education Planning*, (London : Rontledge and Kegan Paul, 1982), h. 63-64.

<sup>12</sup>Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 47.

terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian tentang sistem tersebut dapat dirinci unsur-unsur dari suatu sistem yaitu terdiri dari : (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian-bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bekerja secara mandiri dan bersama-sama yang satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditunjukkan untuk pencapaian tujuan bersama, dan (5) terjadi di dalam sebuah lingkungan yang rumit dan kompleks.

Namun istilah sistem baru memiliki pengertian yang jelas jika dihubungkan dengan istilah lain yang mensifatinya. Seperti sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem keamanan. Adapun dalam kajian ini yang dimaksud adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan.

Dalam aktivitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuannya dan keterbatasannya. Keenam komponen tersebut meliputi: (1) tujuan, (2) pendidik, (3) murid, (4) isi/materi, (5) metode, dan (6) situasi lingkungan.<sup>14</sup> Noeng Muhajir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan terdiri dari : (1) tujuan, (2) subjek pendidik, (3) pendidik, (4) lingkungan. Dari kedua pendapat tersebut

---

<sup>13</sup>Anas Sudjana, *Pengantar Administrasi Pendidikan Suatu Sistem*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), h. 26.

<sup>14</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), h. 121

maka komponen-komponen pendidikan terdiri dari : (1) tujuan, (2) murid, (3) pendidik, (4) metode, (5) isi, (6) lingkungan.<sup>15</sup>

Sementara menurut pendapat Ahmad Tafsir, komponen yang terlibat dalam pendidikan setidaknya ada sepuluh, yaitu (1) tujuan pendidikan, (2) pendidik, (3) siswa, (4) alat-alat pendidikan, (5) kegiatan. Alat pendidikan dirinci lagi (6) kurikulum atau bahan ajar, (7) metode pengajaran, (8) evaluasi, (9) pembiayaan atau gaji, (10) peralatan berupa benda.<sup>16</sup>

### **Realitas Sistem Pendidikan Nasional**

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada jiwa dan kepribadian kebudayaannya. Sistem pendidikan di Indonesia disusun berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

India dan Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di kedua negara tersebut. Beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan, baik oleh India maupun Malaysia. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama tiga setengah abad, justru sistem pendidikan yang banyak digunakan adalah masa kependudukan Jepang. Sebut saja sistem penjenjangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem penjenjangan yang berlaku adalah 6-3-3-4, begitu Indonesia merdeka ternyata sistem penjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun sampai 6 tahun bagi perguruan tinggi.

Tentu saja dengan menyebut kolonial tersebut bukan menunjukkan totalitas karena terlalu banyaknya perbedaan yang dikembangkan oleh negara bersangkutan setelah merdeka. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan di

---

<sup>15</sup>Noeng Muhajir, *Ilmu*, h. 78.

<sup>16</sup>Ahmad Tafsir, *Epistemologi untuk Pendidikan Islam*, (Bandung : Fakultas Tarbiyah IAIN SGD, 1995), h. 100.



Indonesia mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya.<sup>17</sup> Hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan undang-undang tentang pendidikan, yaitu UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional telah mempunyai dasar legalitasnya. Namun demikian pendidikan nasional sebagai suatu sistem bukanlah merupakan suatu hal yang baku. Suatu sistem merupakan suatu proses yang terus-menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya.<sup>18</sup> Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan dalam menciptakan lapangan kerja, bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disanksikan kualitasnya.

Gerakan reformasi tahun 1998, menuntut diadakannya reformasi bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 November 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu dipenuhi oleh DPR-RI bersama dengan pemerintah, dengan disahkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tanggal 11 Juni 2003.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS Tahun 2003 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

a. Pendidikan Prasekolah

Disebut prasekolah karena anak pada usia antara 3 tahun sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan diarahkan untuk persiapan dan

---

<sup>17</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Internalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta : Gema Media, 2003), h. 267-268

<sup>18</sup>H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang : Indonesia Tera, 1999), h. 1

<sup>19</sup>Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS*, (Jakarta : Depag RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2003), h. 1

adaptasi bagi pendidikan berikutnya di SD. Metode dan materi pelajarannya berpola *learning by doing*, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan Taman Kanak-kanak (TK). Umumnya TK ini terdiri dua tingkat, yaitu: TK Kecil usia 4 tahun dan TK Besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK Besar selama setahun, lalu ke SD menjelang anak berusia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu seorang anak diterima masuk SD tanpa melewati pendidikan prasekolah ini.

Umumnya kegiatan belajar di TK sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan keterampilan untuk kreativitas anak, seperti menggunting, melipat, atau mewarnai.<sup>20</sup> Namun demikian, kurang lebih mulai tahun 1990-an di Indonesia juga mengembangkan Kelompok Bermain atau Play Group.

#### b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun yang diselenggarakan di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu, yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Padanan dari SD adalah MI, sedangkan SMP adalah MTS. Bedanya, SD dan SMP berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sedangkan MI dan MTS di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Di samping itu, komposisi kurikulum agamanya lebih banyak di MI dan MTS dengan rasio 70% umum, 30% agama, sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama dua jam pelajaran dalam satu pekan. Jam belajar di SD lebih panjang dari

---

<sup>20</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Internalisasi*, h. 268-269

pada TK. Normalnya siswa masuk kelas pukul 07.00 dan pulang pada pukul 12.00. Meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, menambah jam belajarnya, baik untuk kegiatan ekstra kurikuler maupun pelajaran yang menjadi ciri khas ormas Islam tersebut sehingga siswa bisa pulang sekolah pada pukul 13.30. Beberapa SD unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya hingga sore hari atau biasa dikenal dengan *full days school*. Di sini siswa masuk mulai pukul 07.00 dan pulang pada pukul 16.00, sementara istirahat, sholat, makan siang dimasukkan dalam program pendidikan oleh lembaga tersebut.

Isi kurikulum pendidikan dasar memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris, dan Muatan Lokal. SD menggunakan sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, sedangkan SMP menggunakan sistem guru bidang studi.<sup>21</sup>

### c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah meliputi SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Program pelajaran di SMA dan kejuruan lebih luas dari pada pendidikan dasar. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi, dan Kimia), Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi), dan Pendidikan Seni. Sejak kurikulum 1994,

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 269-270

program pengajaran di jenjang pendidikan menengah ini diatur dalam program pengajaran khusus yang meliputi tiga jurusan, yakni program Bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program Pengajaran Khusus ini diselenggarakan di kelas II dan dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik ataupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk siap terjun ke lapangan kerja.

Kurikulum SMA dan yang sederajat menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu yang masing-masing disebut semester ganjil dan semester genap, sedangkan sistem pengejarannya memakai sistem guru bidang studi.<sup>22</sup>

#### d. Pendidikan Tinggi

Setelah seorang siswa yang telah menamatkan studi di SMA atau yang setaraf dengannya, apabila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester (SKS). Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S.1) dalam waktu 4 tahun. Namun, bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk diwisuda sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Kalau ia berhasil wisuda dan berniat melanjutkan studi lanjut, masih ada dua tahap dalam pendidikan tinggi yang dapat ditempuhnya, yaitu jenjang S.2 atau Magister yang normalnya ditempuh selama 2 tahun dan jenjang S.3 atau Doktor yang efektifnya ditempuh selama 2 tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap pendidikan tinggi ini ditempuh,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 272-273

diberi gelar Doktor untuk bidang yang dipilihnya. Jenjang ini mengakhiri karier akademik seseorang secara formal.

Seperti halnya di banyak negara lain, di Indonesia juga dikenal adanya perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta. Dalam realitasnya, pelajar Indonesia banyak yang mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlebih dahulu, baru menetapkan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kesan sekolah negeri dan PTN lebih unggul dan absah serta dianggap lebih mudah mendapat kerja masih melekat dan banyak diyakini oleh masyarakat. Padahal, setelah peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk perguruan tinggi diberlakukan dengan status *terakreditasi* dan *nonterakreditasi*, sebenarnya PTN dan PTS diperlakukan sama. Bahkan, bisa jadi PTS mendapat nilai lebih baik daripada PTN. Soal unggul dan jaminan kerja merupakan perkara yang relatif. Perguruan tinggi sekedar menyiapkan pesertanya untuk bermasyarakat, sedang keberhasilan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Perguruan tinggi diharapkan berfungsi sebagai *agent of change* bagi pola kehidupan masyarakat modern. Sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan di ruang kelas, penelitian atau riset dilakukan terutama oleh mahasiswa semester akhir sebelum diwisuda (berupa penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi), sedangkan pengabdian dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerjanya Mahasiswa (KKM), atau kalau di universitas keguruan berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).<sup>23</sup>

Berpijak pada paparan di atas, sistem pendidikan di Indonesia dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 275-276

**Sistem Persekolahan Di Indonesia  
Dalam Uu Ri No. 20 Tahun 2003**

## Usia

24	Pendidikan Tinggi	Doktor (S-3)	Program Doktor (S-3)	Spesialis II (SP II)			
23		Magister (S-2)	Program Magister (S-2)	Spesialis I (SP I)			
22		Sarjana (S-1)	Program Sarjana (S-1)	Diploma 4 (D-4)	Diploma 3 (D-3)	Diploma 2 (D-2)	Diploma 1 (D-1)
21							
20							
19							
18	Pendidikan Menengah	Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
17							
16							
15	Pendidikan Dasar	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
14							
13							
12		Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Sekolah Dasar (SD)				
11							
10							
9							
8							
7							
6							
5	Pra-Sekolah	Bustanul Athfal (BA)					
4		Raudlatul Athfal (RA)					
3			Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG)				

### Standarisasi Pendidikan di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum?. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontroversi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalui peserta didik yang telah menepuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah diikuti oleh peserta didik.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidak hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. Semoga jika kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi lebih baik lagi.

Berkaitan dengan standarisasi pendidikan di Indonesia kita bisa mengkajinya melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lingkup standar nasional pendidikan di Indonesia Bab II Pasal (2), yaitu meliputi: (a) Standar Isi, (b) Standar Proses, (c) Standar Kompetensi Lulusan, (d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (e) Standar Sarana dan Prasarana, (f) Standar Pengelolaan, (g) Standar Pembiayaan, dan (h) Standar Penilaian Pendidikan.

## **Proses Belajar Mengajar**

### **a. Efektifitas Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

### **b. Efisiensi Pengajaran di Indonesia**

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih 'mudah'. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.



Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut.

Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di ajarkan keterampilan, yang

sebenarnya bukan kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi pengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya (KTSP). Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kurang efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

### **Evaluasi<sup>24</sup> Pendidikan di Indonesia**

Gronlund, menyatakan bahwa istilah evaluasi dalam bahasa Inggris *evaluation* adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauh mana tujuan atau program tercapai.<sup>25</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wrihstone, dkk., bahwa evaluasi pendidikan adalah

---

<sup>24</sup>Evaluasi berbeda dengan pengukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Pengukuran bermaksud menentukan luas, dimensi, banyaknya, derajat atau kesanggupan suatu hal atau benda. Tugas pengukuran berhenti pada mengetahui “berapa banyak pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik”, tanpa memperhatikan arti dan penafsiran mengenai banyaknya pengetahuan yang dimiliki itu. Apabila hasil pengukuran itu ditafsirkan artinya berdasarkan norma-norma dan tujuan tertentu, maka pekerjaan itu ditafsirkan sebagai penilaian. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. ke-3, h. 156-157. Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar baru Algensindo Offset, 2004), cet. ke-4, h. 203-204.

<sup>25</sup>Norman E Gronlund, *Human Behavior at Work*, (New York : Mc. Graw Hill, 1975), h. 141.

penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemauan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum.<sup>26</sup>

Evaluasi yang dilakukan terus-menerus adalah salah satu di antara komponen pendidikan nasional. Evaluasi adalah tindakan penilaian yang menganalisa semua aspek belajar guna mempertinggi efektivitas belajar.<sup>27</sup> Penilaian meliputi semua aspek belajar. Penilaian adalah suatu upaya untuk memeriksa sejauh mana peserta didik telah mengalami kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan belajar dan pembelajaran.<sup>28</sup> Dalam proses belajar dan pembelajaran, evaluasi itu ada dua jenis, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran.

Evaluasi hasil belajar merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.<sup>29</sup> Evaluasi ini berfungsi untuk: (1) memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar, (2) memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar peserta didik lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu, (3) memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial, (4) memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan, (5) memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku peserta didik, sehingga pendidik dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas, dan (6) memberikan informasi yang tepat untuk membimbing peserta didik memilih

---

<sup>26</sup>Wrightstone, *Effective Teaching: A Practicall Guide to Improve Your Teaching*, (New York : Longman Group UK Limited, 1982), h. 211.

<sup>27</sup>Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 116.

<sup>28</sup>Oemar Hamalik, *Kurikulum*, h. 157.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 159.

sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan minat dan bakatnya.<sup>30</sup> Sasaran evaluasi hasil belajar adalah tujuan yang ditetapkan dalam belajar, yaitu ranah kognitif<sup>31</sup>, ranah afektif<sup>32</sup> dan ranah psikomotor<sup>33</sup>.

Yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar dan pembelajaran. Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan kepada komponen-komponen sistem pembelajaran, yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal peserta didik, komponen input instrumetal, yaitu kemampuan profesional pendidik, komponen kurikulum (program studi,

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 160-161.

<sup>31</sup>Untuk menilai pengetahuan dipergunakan pengujian di antaranya sebagai berikut: (1) sasaran penilaian aspek pengenalan (*recognition*), caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bentuk pilihan ganda yang menuntut peserta didik dapat melakukan identifikasi tentang fakta, definisi, contoh-contoh yang betul; (2) Sasaran penilaian aspek mengingat kembali (*recall*), caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik; (3) Sasaran penilaian aspek pemahaman (*comprehension*), caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut identifikasi terhadap pernyataan-pernyataan yang betul dan konklusi atau klasifikasi; dengan daftar pertanyaan *matching* (menjodohkan) yang berkenaan dengan konsep, contoh, aturan, penerapan, langkah-langkah dan urutan, dengan pertanyaan bentuk essay yang menghendaki uraian, perumusan kembali dengan kata-kata sendiri, contoh-contoh. *Ibid.*, hlm. 161-162. Oemar Hamalik, *Psikologi*, h. 209.

<sup>32</sup>Sasaran evaluasi aspek afektif (sikap dan nilai) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Aspek penerimaan, yakni kesadaran peka terhadap gejala dan stimulus serta menerima atau menyelesaikan stimulus aa gejala tersebut; (2) Sambutan, yakni aktif mengikuti dan melaksanakan sendiri suatu gejala di samping menyadari dan menerimanya; (3) Aspek penilaian, yakni perilaku yang konsisten, stabil dan mengandung kesungguhan kata hati dan kontrol secara aktif terhadap perilakunya; (4) Aspek organisasi, yakni perilaku menginter-nalisasi, mengorganisasi dan memantapkan interaksi antara nilai-nilai dan menjadikannya sebagai suatu pendirian yang teguh; (5) Aspek karakteristik diri dengan suatu nilai atau kompleks nilai, ialah menginternalisasikan satu nilai ke dalam sistem nilai dalam diri ndividu, yang berperilaku konsisten dengan sistem nilai tersebut. Oemar Hamalik, *Kurikulum*, h. 162.

<sup>33</sup>Sasaran evaluasi keterampilan reproduktif meliputi: (1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya masalah-masalah yang familier untuk dipecahkan dalam rangka menentukan ukuran-ukuran ketepatan dan kecapatan melalui latihan-latihan jangka panjang, evaluasi dilakukan dengan metod-metode tertutup; (2) Aspek keterampilan psikomotorik dengan tes tindakan terdapat pelaksanaan tugas yang nyata atau yang disimulasikan, dan berdasarkan kriteria ketepatan, kecapatan, kualitas penerapan secara objektif. Contoh: latihan mengetik, keterampilan menjalankan mesin, dan lain-lain; (3) Aspek keterampilan reaktif, dilaksana-kan secara langsung dengan pengamatan obyektif terhadap tingkah laku pendekatan atau penghindaran, secara tidak langsung dengan kuisisioner sikap; (4) Aspek keterampilan interaktif, secara langsung dengan menghitung frekuensi kebiasaan dan cara-cara yang baik yang dipertunjukkan pada kondisi-kondisi tertentu. Adapun evaluasi keterampilan produktif, meliputi: (1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya masalah-masalah yang tidak familier untuk dipecahkan dan pemecahannya tidak begitu rumit, dengan menggunakan metode terbuka tertutup (*open ended methods*); (2) Aspek keterampilan psikomotorik, yani tugas-tugas produktif yang menuntut perencanaan strategi. Evaluasi terhadap hasil dan proses perencanaan adalah dengan observasi dan diskusi; (3) Aspek keterampilan reaktif, secara langsung mengamati sistem nilai masyarakat dalam tindakannya di luar sekolah; dan (4) Aspek keterampilan interaktif dengan observasi keterampilan dam situasi senyatanya. Oemar Hamalik, *Kurikulum*, h. 162-163. Oemar Hamalik, *Psikologi*, h. 212-214.

metode, media), komponen administrasi (alat, waktu, dana), komponen proses, yaitu prosedur pelaksanaan pembelajaran, komponen output yaitu hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran.<sup>34</sup> Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan pendidikan.

Ada tiga aspek dalam evaluasi itu, yaitu: *Pertama*, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Yaitu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program proses pembelajaran, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung setelah program itu dianggap selesai. *Kedua*, di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi dan data yang menyangkut obyek yang sedang dievaluasi. *Ketiga*, setiap kegiatan evaluasi pengajaran tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai.

Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapat data objektif yang menunjukkan tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler. Hasil evaluasi digunakan oleh guru-guru dan pengawas pendidikan untuk menilai keefektifan pengalaman pembelajaran, kegiatan-kegiatan belajar, dan metode-metode pembelajaran yang digunakan.

## Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan.

---

<sup>34</sup>Oemar Hamalik, *Kurikulum*, h. 171.

Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa.

### Daftar Pustaka

- Ansyar, Mohd, *Proses Pendidikan Guru dan Arus Perubahan*, Makalah yang disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II di Medan, 4-8 Februari 1992.
- American Marketing Association, *Dictionary of Marketing Terms. [Online]*, Tersedia:<http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view4089.php>., [10 Oktober.2011. pukul 14.20], 2011.
- Buchori, Mochtar, *Menyongsong Globalisasi: Dibutuhkan Loncatan Konseptual dan Kepemimpinan Intelektual*, Hasil Wawancara, Mimbar Pendidikan, Journal Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
- Depdikbud, *Komunikasi Pendidikan*, Program Akta Mengajar V-B Komponen Bidang Studi Teknologi Pengajaran, Buku Modul 22-DIK (1982/1993), Jakarta: Proyek PIPT, Dirjen Dikti Depdikbud, 1993.
- Edgar, Faure, *et.al.*, *Belajar untuk Hidup: Dunia Pendidikan Hari Kini dan Hari Esok*, Terj. oleh PT. Bhatara Karya Aksara, Jakarta: Unesco-Bhatara, 1981.
- Fowles, J. *et.al (ed.)*, *Handbook of Futures Research*, London: Greenwood Press, 1984.
- Frenkel, Jack R., dan Norman E. Wallen, *How Design and Evaluate Research in Education. Second Edition*, New York: McGraw-Hill International, 1990.
- Fullan, M., *The Challenge of School Change*, Illinois: IRI/SkyLight Training and Publishing Inc., 1997.
- Hamijoyo, Santoso S., *Lima Jurus Strategi Dasar Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*, Mimbar Pendidikan, Journal No. 4 Tahun IX, 1990.
- Hasan, Fuad, *Mendekatkan Anak Didik pada Lingkungan, Bukan Mengasingkannya*, (Dialog), Prisma No.2 Tahun XV, 1986.
- Houston, W.R. Warner, *Touch the Future: Teach!*, St Paul: West Publishing Company, 1988.
- J., Pear dan R. Robinson, *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Terjemahan), Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Joni, T. Raka, *Penelitian Pengembangan dalam Pembaharuan Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK Ditjen Depdikbud, 1984.
- Lovat, T.J., and Smith, D.L., *Curriculum: Action on Reflection*, Wentworth Falls NSW: Social Science Press, 1993.
- Makagiansar, Makaminan, *Dimensi dan Tantangan Pendidikan dalam Era Globalisasi*, (Hasil Wawancara), Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
- Maksum, A. dan Ruhendi, L.Y., *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern: Mencari Visi Baru alas Realitas Baru Pendidikan Kita*, Yogyakarta: IRCISoD, 2004.

- Marzurek, K. Winzer, M.A. dan Majorek, C. (ed), *Education in a Global Society: a Comparative Perspective*, Boston: Allyn and Bacon, 2000.
- Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P., *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Rini, Riswanti, Cicih Sutarsih, dan Udik Budi Wibowo, *Makalah Konsep Dasar Futurologi Pendidikan*, Bandung: PPs UPI, 2005.
- Rivai, Tb. B., *Futurologi*, Ringkasan Ceramah pada Sekolah Staf dan Komando TNI AD, tanggal 22 Maret 1984, Bandung: t.th., 1984.
- Sayling, W., *Future of Education (Masa Depan Pendidikan): Pandangan Seorang Usahawan Teknologi tentang Peran IT dalam Merevolusi Pendidikan di Asia*, Batam: Lucky Publisher, 2003.
- Salim, Emil, *Pembekalan Kemampuan Intelektual untuk Menjinakkan Gelombang Globalisasi*, (Hasil Wawancara), *Mimbar Pendidikan*, *Journal Pendidikan* No. 4 Tahun IX, 1990.
- Shane, Harold G., *Arti Pendidikan Bagi Masa Depan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sudarmono, Pratiwi, *Globalisasi sebagai Peluang untuk Pengembangan Diri*, (Hasil Wawancara), *Mimbar Pendidikan*, *Journal Pendidikan* No.4 Tahun IX, 1990.
- Supriadi, Dedi, *Globalisasi: Dunia Tanpa Tabal Batas*, (Tinjauan Buku), *Mimbar Pendidikan*, *Journal Pendidikan* No. 4 Tahun IX, 1990.
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tirtamihardja, Umar dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta